

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya otonomi daerah adalah bagian dari sistem politik yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam suatu negara agar menyumbangkan kreatifitas dan ide maupun gagasannya. Otonomi daerah dalam era globalisasi dan reformasi merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan jika otonomi daerah tidak ada maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perdagangan bebas yang kini mulai berlaku.

Kewenangan desa adalah elemen penting dari otonomi desa, karena kewenangan desa ini merupakan hak yang kemudian dimiliki oleh desa dalam mengatur penuh urusan dalam rumah tangganya sendiri. Ini dapat diartikan kewenangan jika unsur utamanya adalah pemerintah desa karena tanpa pemerintah desa pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang ada di desa yang kemudian mempunyai hak usul dan adat istiadat di desa.

Salah satu sistem kelola pemerintah adalah pemerintah desa yang merupakan turunan dari sistem pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mewujudkan keinginan masyarakat desa sesuai otonomi desa yang dimilikinya. Pemerintahan desa melalui berbagai program dalam pengembangan ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah desa untuk megembangkan ekonomi desa secara merata.

Penghambat daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan ekonomi di desa dengan baik ada faktor yang mendasarinya. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah adalah bagian dari mematikan semangat kemandiriannya sehingga sistem ekonomi di pedesaan tidak berjalan secara efektif dikarenakan efek ketergantungan tersebut.

Kemandirian lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh warga desa karena belajar dari pengalaman dan pendekatannya diharapkan mampu untuk mengatasi pergerakan ekonomi di desa secara sistematis dan transparan dengan baik. Hal demikian juga berdasarkan keinginan masyarakat dari adanya potensi jika ada yang mengelolanya.

Usaha yang dibentuk oleh desa dan pengelolaannya yang dilakukan kerjasama oleh pemerintah desa dan masyarakat ini merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kesejahteraan masyarakat desa dalam hal ini Bumdes berperan langsung dalam meningkatkan sistem tata kelola perekonomian. Adanya Bumdes tentu membantu mengembangkan dan membangun usaha guna, maka pemerintah pusat atau maupun daerah dapat mendorong masyarakat yang berada di desa. Badan Usaha Milik Desa atau bisa disebut dengan (BUMDES) yaitu suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang tidak dapat dipisahkan.

Upaya meningkatkan pembanguna desa yang memiliki kualitas hidup yang mensejahterakan masyarakatnya adalah komitmen dalam pembanguna desa. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah mendirikan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial BUMDesa sebagai pihak lembaga sosial yang berpihak kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan baik. Sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui baran dan jasa (sumber daya lokal) melalui penawaran ke pasar.

Dalam menjalankan bisnis, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, bentuk BUMDes akan berbeda di setiap desa di Indonesia. Bentuk keragaman ini didasarkan pada karakter lokal, potensi dan sumber daya masing-masing desa.

Menurut Puslitbang Dinamika Sistem Pembangunan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga niaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa, dibentuk sesuai kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya pada umumnya. Hal ini agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, agar tidak mengembangkan sistem komersial kapitalis.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan

berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes memenuhi kebutuhan masyarakat (produksi dan konsumsi) melalui distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Mengingat BUMDes akan menjadi BUMDes utama penggerak perekonomian pedesaan, tujuan pemenuhan permintaan ini adalah untuk tidak membebani masyarakat.

Instansi juga harus dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menetapkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar yang berlaku. ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Badan usaha milik desa adalah badan usaha desa yang didirikan/didirikan oleh pemerintah desa, dan kepemilikan modal serta hak pengelolaannya ditanggung bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMD juga berdasarkan Permendagri Bab 2 Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang

Pembentukan BUMDes. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota melalui pengembangan peraturan daerah tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Selain itu, pemerintah desa telah membentuk peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka akan muncul Peraturan Daerah yang berbunyi: “Untuk melaksanakan tugas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan prinsip untuk menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif,

Sebagai instansi pemerintah, desa merupakan pionir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan tumpuan sistem sosial nasional Indonesia yang sangat kuat dan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan politik yang stabil dan dinamis. sistem pertahanan. Jadikan desa sebagai mikrokosmos, contoh yang baik untuk mengamati secara dekat interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui desa inilah BUMDes dapat diatur sesuai dengan peraturan daerah dengan mengacu pada peraturan desa. BUMDes juga diharapkan dapat merangsang dan mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan. Aset ekonomi di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat solidaritas dan swadaya dalam upaya penguatan aspek ekonomi kelembagaannya.

Pada tahap ini, BUMDes akan digabungkan dengan upaya peningkatan sumber pendapatan utama desa dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, dan peran BUMDes sebagai lembaga payung akan dibayangi. Upaya ini juga penting untuk mengurangi peran free riders yang seringkali meningkatkan biaya transaksi kegiatan ekonomi di masyarakat melalui perilaku rent-seeking (Nurcholis, 2011).

Lahirnya BUMDes merupakan pendekatan baru yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam artian, usaha yang ingin diwujudkan adalah hasil penyulingan dari keinginan dan keinginan untuk menciptakan kemajuan desa. Dengan mengadaptasi kegiatan ekonomi masyarakat atau mendirikan lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional namun tetap memiliki standar potensi desa yang ada, maka usaha masyarakat akan lebih efektif dan produktif kedepannya. BUMDes akan menjadi pilar independen.

Program BUMDes adalah salah satu langkah jitu pemerintah untuk mengengurangi kemiskinan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes di Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan baik. Dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang sesuai kemampuan melalui sumber daya alam dan potensi desa lainnya. Maka didirikannya BUMDes Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat didesa Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andriani Sari (2017) dijelaskan perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya BUMDes, yang dihitung berdasarkan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes yang artinya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. pembangunan desa di kabupaten Perbaungan.

Kajian yang dilakukan Ramadana di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, menyimpulkan bahwa BUMDes dianggap tidak berhasil sebagai lembaga penguatan ekonomi karena hanya sebagian masyarakat yang terbantu, artinya seluruh BUMDes tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat. masyarakat, dan tidak berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa.

Hasil pada efek memiliki hasil yang beragam berdasarkan deskripsi konteks pertanyaan dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk memilih judul pada pertanyaan tersebut. **Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Ekonomi Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah apakah BUMDes berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini agar dalam pelaksanaannya nanti dapat dijadikan pedoman guna melangkah kedepannya adalah untuk mengetahui apakah BUMDes berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam penelitian pada bidang yang sama dan bermanfaat bagi pembaca.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi setiap perusahaan atau organisasi dalam upaya peningkatan perekonomian yang lebih baik, selain itu penelitian ini juga menambah wawasan dan pengetahuan Bumdes, khususnya yang berhubungan dengan pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas dan menghindari pembatasan yang terlalu luas, maka yang

menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan materi pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa, dan masyarakat mengelola lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perekonomian desa. BUMDes dibentuk berdasarkan kesepakatan antar masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian pedesaan. BUMDes berfungsi sebagai lembaga komersial, dengan menyediakan sumber daya lokal yang bertujuan mencari keuntungan dan menyediakan lembaga sosial yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat ekonomi pedesaan dan mengembangkan ekonomi masyarakat (Alkadafi, 2014).

Ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga komersial lainnya (Development System Dynamics Research Center) adalah (1) badan komersial dimiliki oleh desa dan dioperasikan bersama; (2) 51% dana operasional berasal dari dana tingkat desa dan 49 % dari dana masyarakat; (3) Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan

operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah desa, yang pemilikan modal dan hak pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan tulang punggung perekonomian pedesaan sebagai lembaga sosial dan komersial yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan keuntungan. Selain itu, Ibrahim mengungkapkan bahwa usaha desa merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh desa untuk menghasilkan produk yang dapat meningkatkan keuangan desa.

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya bersumber dari Desa melalui penyertaan secara langsung kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelolanya. aset, layanan, dan bisnis lainnya. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
2. BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau Kerja sama antar-Desa.

3. BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan, dan aksi kolektif.
4. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa bersifat kolektif.

BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. BumDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambahan dalam pengelolaan aset ekonomi desa.
2. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar dalam jaringan pasar.
3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan.
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa.

Bumdes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BumDes juga memberikan sumbangan bagi peeningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Terdapat beberapa ciri utama yang membedakan BumDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat.
3. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
4. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.

2.1.1 Tujuan Bumdes

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa.
- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

2.1.2 Pengelolaan Bumdes

BUMDes merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara menyeluruh yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Desa. BUMDes juga didirikan dengan pertimbangan untuk membimbing prakarsa masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan aset pemerintah desa yang dikelola oleh BUMDes.

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan mencapainya dengan menyediakan layanan yang mereka butuhkan bagi usaha produktif, terutama masyarakat pedesaan yang tergolong miskin, mengurangi praktik rentenir dan membebaskan dana. Selanjutnya, BUMDes didirikan untuk menciptakan pemerataan wilayah usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014). Prinsip-prinsip yang mengatur BUMDes (Ridlwan, 2014) adalah

1. Kerjasama, semua komponen terlibat dalam pengelolaan BUMDes dan dapat bekerja sama dengan baik.
2. Partisipatif, semua komponen terlibat Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
3. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.

4. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun *administrative* harus dipertanggungjawabkan
5. Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

2.1.3 Manfaat Bumdes

Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa, lebih dari itu BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. BUMDes memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, bila dikelola secara baik, karena bisa berperan dari hulu hingga hilir. Peran dari hulu misalnya, BUMDes bisa berperan untuk membantu menyalurkan berbagai subsidi pemerintah, mulai dari subsidi pupuk, benih dan lainnya. Sedangkan di sektor hilir, BUMDes bisa jadi pengumpul hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat desa.

BUMDes juga bisa bermitra dengan perbankan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini dikelola oleh perbankan pemerintah dan sebagian perbankan swasta. BUMDes, juga bisa berperan sebagai pengelola keuangan inklusif seperti usaha simpan pinjam yang bila dikelola dengan baik, bisa meningkatkan pendapatan yang cukup baik, BUMDes bisa menjadi sarana pembayaran air, listrik dan gas. Secara garis besar BUMDes memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik

a. Komersil

Sebagai lembaga komersil Bumdes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi .

b. Pelayanan public

BUMDes tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial. Dari banyaknya manfaat yang di terima dari pendirian BUMDes maka Desa akan mandiri baik dibidang ekonomi maupun pelayanan publik. Maka diharapkan untuk seluruh masyarakat desa-desa di Indonesia segera membentuk BUMDes dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian desa.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Bumdes

Peraturan Menteri Desa, Pembinaan dan Pemindahan Daerah Miskin Nomor 4 Tahun 2015 Republik Indonesia tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menetapkan bahwa pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa
3. Penguatan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa
4. Menyusun rencana kerjasama komersial antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

5. Menciptakan peluang pasar dan jaringan yang mendukung kebutuhan pelayanan publik warga.
6. Terbukanya kesempatan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengurusan dan Pengurusan Lembaga serta Pembubarannya Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa:
 1. BUM Desa dapat terdiri dari badan-badan yang berbadan hukum
 2. Badan yang berbadan hukum dapat berupa badan yang kepemilikan modalnya dimiliki oleh BUMD Desa dan pemerintah daerah.
 3. Apabila BUM Desa tidak berbadan hukum, maka bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa yang membentuk BUM Desa. Karakteristik BUMDes sesuai dengan fungsi pokok, prinsip dasar, mekanisme dan sistem pengelolaannya. Secara umum, untuk mendirikan BUMDes Anda perlu:
 1. Meningkatkan pelayanan masyarakat (standar pelayanan minimal) untuk mengembangkan usaha masyarakat di desa.
 2. Memperkuat desa sebagai daerah otonom dalam hal kemiskinan, pengangguran dan upaya produktif untuk meningkatkan pengetahuan PADesa.

3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa dan masyarakat untuk memperkuat ekonomi desa (Development Systems Dynamics Research Centre, 2007:12).

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Penatausahaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 8 tentang Pembinaan dan Pemukiman Kembali Daerah Tertinggal menyebutkan bahwa BUM Desa dapat membentuk badan usaha termasuk : mengatakan.

1. Perseroan terbatas sebagai perseroan modal didirikan berdasarkan suatu perjanjian dan menjalankan kegiatan usahanya dengan modal pokok BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

2. Lembaga keuangan mikro yang memiliki 60% saham BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes perlu dirumuskan atau dijabarkan agar sama-sama dipahami dan diakui oleh pemerintah desa, anggota (pemegang saham), BPD, pemerintah provinsi, dan masyarakat setempat. Pengelolaan BUMDes memiliki enam prinsip.

1. Koperasi

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bekerja sama dengan baik untuk pengembangan bisnis dan kelangsungan hidup. BUMDes merupakan penopang kegiatan ekonomi desa, berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengelola, pemerintah desa, masyarakat dan instansi terkait.

2. Partisipatif Seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mau atau didorong untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat memajukan kemajuan usaha BUMDes. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan, dan komunikasi antar masyarakat desa oleh pemerintah negara bagian dan/atau kabupaten tentang pentingnya berpartisipasi dalam BUMDes dalam meningkatkan kepentingan masyarakat, diharapkan pemerintah berperan dalam meningkatkan kesadaran.

3. Pembebasan. Semua elemen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, atau agama. Mekanisme pelaksanaan BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa, apapun latar belakangnya. Oleh karena itu, masyarakat pedesaan perlu dipersiapkan terlebih dahulu untuk menerima ide-ide baru bagi lembaga-lembaga ekonomi yang melayani fungsi ganda sosial dan komersial.

4. Transparan. Kegiatan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum perlu segera diketahui dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dimana nilai-nilai yang ingin dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan, maka transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan. Kinerja BUMDes dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan kebahagiaan warga desa.

5. penanggung jawab Semua kegiatan bisnis harus dapat dilacak secara teknis dan administratif. Pendirian dan pengelolaan usaha desa (BUMDes) merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang bertanggung

jawab. Untuk itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan unit-unit usaha tersebut efektif, efisien, profesional, mandiri dan akuntabel.

6. Berkelanjutan. Kegiatan usaha harus dikembangkan dan dipelihara dalam wadah BUMDes oleh masyarakat. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas: pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Tujuan tersebut adalah untuk melayani kebutuhan usaha produktif, khususnya masyarakat miskin pedesaan, mengurangi praktik ijon (sewa), membebaskan dana, meratakan peluang usaha, dan menjauh dari pedesaan. masyarakat.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat agar terbiasa menabung guna mendorong pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan).

2.1.5 Indikator Bumdes

Menurut Insar (2020:37) untuk memudahkan proses menjalankan bumdes lebih baik maka indikator bumdes yang tersusun ddibagi dalam tiga bagian yaitu:

1. Dimensi Ekonomi

Membangun kemitraan dalam pengembangan produk usaha apabial bumdes belum ada kemitraan ataupun sudah namun beum menguntungkan maka bentuk yang dapat dilakukan dengan membentuk unit usaha berbasis kerjasama mengadakan pelatihan-pelatihan antara lain pelatihan pengembangan manajemen kemitraan, pelatihan kerjasama antara bumdes dan pelatihan manajemen kemitraaan serta pelatihan mitra usaha.

2. Dimensi Manajemen

Apabila pelaksana operasional bumdes rata-rata memiliki pendidikan yang masih rendah maka bentuk yang dapat dilakukan antara lain dengan menyertakan syarat minimal pendidikan pengelola bumdes dalam seleksi pelaksanaan operasional dapat berlaku untuk semua atau dapat di spesifikasikan untuk pelaksana operasional tertentu yang membutuhkan kompetensi tinggi, mendorong pelaksana operasional bumdes untuk mendapatkan beasiswa yang lebih tinggi. Pemberian beasiswa pada pelaksana operasional bumdes untuk mendapatkan sekolah lebih tinggi dan mendorong partisipasi masyarakat desa yang memiliki pendidikan minimal setingkat SMA untuk dapat bergabung bersama bumdes.

3. Dimensi Sosial

Dimensi sosial ini sebagai dorongan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengembangkan bumdes dengan baik. Apabila bumdes belum ada partisipasi pemuda dan pemudi maka bentuk yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi pemuda dan pemudi untuk bergabung bersama bumdes hal ini dapat dilakukan dengan pemberian kesempatan untuk terlibat di bumdes melalui penerimaan pengelola bumdes dengan syarat usia muda. Selain itu dapat dilakukan dengan mengarahkan pekerjaan atau penggunaan sarana dan prasarana pendukung bumdes yang domainnya bidang anak muda.

2.2 Ekonomi Desa

2.2.1 Pengertian Ekonomi Desa

Perbaikan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Di sisi lain, ekonomi, yang berasal dari kata ekonomi, mengacu pada ilmu tentang prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan komoditas dan kekayaan (keuangan,

industri, komersial, dll.). Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbaikan ekonomi adalah perubahan tingkat atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi lebih baik, atau kemajuan dari sebelumnya. Perekonomian nasional adalah perekonomian yang dimiliki oleh segelintir orang dan didominasi oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Mengembangkan ekonomi berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Membangun ekonomi berarti memberdayakan atau memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi mereka.

Upaya mobilisasi sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat menjadikan masyarakat lebih produktif dan menggali serta menyediakan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Dengan cara ini, masyarakat dan lingkungan dapat berpartisipasi dalam penciptaan dan pertumbuhan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut Mubyarto (2015:3), pembangunan ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari tiga aspek:

- a. Menciptakan suasana dan iklim yang dapat menumbuhkan potensi masyarakat. Titik tolaknya adalah kesadaran bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk dikembangkan dan tidak ada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya.
- b. Untuk memperkuat potensi ekonomi masyarakat dan untuk memperkuat potensi ekonomi rakyat, yang utama adalah meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan dan terbuka untuk menangkap peluang ekonomi
- c. Mengembangkan ekonomi nasional juga berarti melindungi masyarakat, mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan mencegah kelompok ekonomi yang kuat dieksploitasi

oleh yang lemah. Upaya perlindungan masyarakat masih dalam proses penguatan dan pengembangan inisiatif.

Indikator Peningkatan Ekonomi Masyarakat oleh Sri Eka

a. Sumber daya alam

Sebagian besar masyarakat mengandalkan sumber daya alam untuk melakukan proses pembangunan. Namun sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi kecuali didukung oleh kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam yang dimaksud meliputi kesuburan tanah, sumber daya mineral, pertambangan, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut

b. Sumber daya manusia

Seperti halnya proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Sumber daya masyarakat merupakan faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kecepatan proses pertumbuhan ekonomi tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk melakukan proses pembangunan ekonomi.

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah memudahkan percepatan proses pembangunan, perubahan pola kerja yang semula menggantikan tangan manusia dengan mesin-mesin canggih, serta efisiensi, kualitas dan kuantitas banyak kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan. Dan itu pada akhirnya menyebabkan laju pertumbuhan yang dipercepat. yaitu budaya. Budaya memiliki dampak unik pada pertumbuhan ekonomi. Faktor ini

dapat berperan sebagai generator atau penggerak dalam proses pembangunan, tetapi juga dapat menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong perkembangan meliputi sikap seperti kerja keras dan cerdas, integritas dan ketekunan.

e. Sumber daya modal

Sumber daya manusia diperlukan untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya modal berupa barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Lincoln, di sisi lain, mendefinisikan unsur-unsur pembangunan ekonomi sebagai berikut:

a. sebuah. konsisten

Sebuah proses yang berarti perubahan terus menerus

b. Penghasilan

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita. Pertumbuhan pendapatan per kapita harus berlanjut dalam jangka panjang

c. Pemenuhan

d. Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. yaitu perbaikan sistem

Memperbaiki sistem kelembagaan di segala bidang (ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dll). Sistem kelembagaan ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek pembenahan di bidang organisasi (kelembagaan) dan aspek perbaikan di bidang regulasi (baik formal maupun informal legislasi).

Asas penyelenggaraan BUMDes adalah terwujudnya pengelolaan ekonomi desa produktif yang dilaksanakan secara komparatif, partisipatif, membebaskan dan transparan. Oleh karena itu, manajemen memiliki dampak yang besar pada peningkatan perekonomian masyarakat di sini, karena manajemen ini merupakan dasar untuk beroperasinya suatu organisasi atau kegiatan. Dimana pengelolaan ini dapat memberikan dampak positif bagi BUMDes kedepannya. Dampak BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, peran BUMDes sangat penting. Karena BUMDes memiliki banyak aspek seperti alat komunikasi, perlakuan, kebijakan dan pengikut strategi. Dimana BUMDes memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian.

Keberadaan BUMDes meningkatkan kelangsungan ekonomi dari pendapatan asli desa, mengembangkan potensi ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja dan mengelola dukungan modal dari pemerintah dan sumber lain, peran masyarakat dapat diperkuat.

2.2.2 Indikator Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa

Perekonomian suatu negara merupakan salah satu ukuran kekayaan dan kemakmuran suatu desa. Perekonomian merupakan bagian integral dari skala kekayaan dan kemakmuran masyarakat desa, sehingga diperlukan upaya untuk mengembangkan perekonomian desa. Ini dibentuk oleh kekuatan yang secara independen mengatur desa, pemerintah, dan ekonomi. UU Desa memberdayakan masyarakat desa untuk melakukan upaya pembangunan ekonomi desa.

Indikator Ekonomi Masyarakat Pedesaan oleh Ryan (2019:05)

1. Infrastruktur desa yang baik

Infrastruktur merupakan indikator pertama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan dan ini termasuk akses jalan ke desa-desa di sekitar desa. Karena pembangunan infrastruktur yang baik merupakan indikator kunci dari upaya pembangunan ekonomi, akses jalan yang mudah ini memudahkan desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan desa lain dan daerah lain dalam transportasi dan pemasaran produk.

2. Pendapatan penduduk

Tentu saja, tingkat pendapatan penduduk merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat pedesaan. Apakah pendapatan penduduk memenuhi kebutuhan atau masih di bawah rata-rata Tingkat pendapatan penduduk yang merata merupakan contoh keberhasilan pengelolaan ekonomi yang berkeadilan di desa.

3. Fasilitas desa

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa, fasilitas umum desa harus memadai. Lembaga publik adalah lembaga yang memajukan dan memajukan aspek kehidupan masyarakat dan melakukan kegiatan ekonomi. Di antara fasilitas tersebut adalah keberadaan pasar desa sebagai tempat perdagangan ekonomi. Selain fasilitas yang mendukung keberlanjutan ekonomi, fasilitas lain yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi antara lain ketersediaan fasilitas seperti sekolah, puskesmas, dan balai latihan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya untuk memberikan bahan perbandingan dan memperjelas pembahasan penelitian. Di bawah ini adalah pengantar singkat untuk hasil penelitian kami

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Mutmainnah (2021)	Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara	Bumdes (X), Ekonomi Desa(Y)	Hasil penelitian adalah BUMDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan ekonomi Desa di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
2.	Andriani Sari (2017)	Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai	Bumdes (X), Ekonomi Desa (Y)	Hasil Penelitian adalah terdapat pengaruh sebelum dan sesudah dengan adanya BUMDes. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa.
3.	Hikmawati (2021)	Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa	Bumdes (X), Ekonomi Desa (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Didesa

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
		Duampanue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai		Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai dapat dirasakan manfaatnya yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dapat dilihat dengan adanya peternakan sapi (sapi limosin) dan juga bisa meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). Badan usaha milik desa (BUMDes) memiliki kontribusi kepada masyarakat pedesaan.
4.	Yudistira Harisandi (2016)	Analisis pengaruh Bumdes Dalam Meningkatkan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Situbondo	Bumdes (X), Ekonomi Desa (Y)	Hasil analisis SEM menunjukkan tingginya nilai koefisien yang menggambarkan kekuatan kontribusi indikator terhadap pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo. Dari hasil penelitian ini indikator yang kuat adalah X1.4 (etos kerja/sosial terhadap pengelolaan BUM Desa), X2.1 (ketersediaan sumberdaya alam dan potensi wilayah), X3.2 (ketersediaan sarana pendukung),

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				X4.2 (organisasi sosial (<i>network</i>)) dan Y1.2 (jumlah dan ragam prasarana dan sarana wilayah perdesaan yang mendukung untuk pengembangan dan keberlanjutan BUM Desa di Kabupaten Situbondo).
5.	Ni Luh Putu (2019)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibuneneng Kuta Utara	Bumdes (X), Kesejahteraan Masyarakat(Y)	Peranan BUMDES Gentha Persada dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha simpan pinjam, jasa sampah, <i>money charger</i> , dan perdagangan. BUMDes juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Tibubeneng sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu BUMDes Gentha Persada sudah memberikan pembagian keuntungan untuk menambah Pendapatan Asli Desa Tibubeneng.
6.	Chritiani Kerap (2021)	Pengaruh Implementasi Badan Usaha	Bumdes (X), Ekonomi Desa (Y1),	Hasil penelitian uji secara parsial menunjukkan bahwa

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
		Milik Desa (Bumdes) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tulap	Kesejahteraan Masyarakat (Y2)	Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berpengaruh signifikan terhadap Pengembangan Ekonomi Desa dan Kesejahteraan Masyarakat.
7.	Akfan (2021)	Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Kondisi Kehidupan Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali)	Bumdes (X), Ekonomi Desa (Y)	Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa fungsi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali yaitu fungsi BUMDes dalam upaya meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, BUMDes yang berada di desa Bahomotefe masih belum secara signifikan menjalankan fungsinya dalam upaya meningkatkan kondisi sosial.
8.	Raudatul Firdaus (2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan	Bumdes (X), Ekonomi Desa(Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bumdes dalam meningkatkan perekonomian sudah

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
		Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep		baik dalam pelaksanaannya, dengan berkembangnya Bumdes meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat Desa Manding Laok. Untuk pelaksanaan Bumdes masih perlu diperbaiki pada aspek sumber manusia. Rekomendasi yang diberikan yaitu meningkatkan kualitas pada sumber daya manusia, meningkatkan sumber daya, dan memahami karakteristik pesaing sehingga pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan.
9.	Zulifah Chikmawati (2019)	Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia	Bumdes (X), Ekonomi Desa (Y)	Ekonomi pedesaan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur dan sumber daya struktur. Persoalan kesejahteraan masyarakat desa bermula dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah. Strategi

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				<p>pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan. Goal yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas.</p>
10.	Yogi Yadi Putra (2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa Tandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan	Bumdes (X), Ekonomi Desa (Y)	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pemberdayaan ekonomi yang diimplementasikan BUMDes belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tandung. Kurang efektifnya pemberdayaan ekonomi yang diimplementasikan oleh BUMDes Berkah karena di pengaruhi oleh beberapa hal seperti; jenis usaha yang terbatas, pengelolaan yang kurang baik, intervensi pemerintah yang berdampak</p>

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				kepada kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan BUMDes.

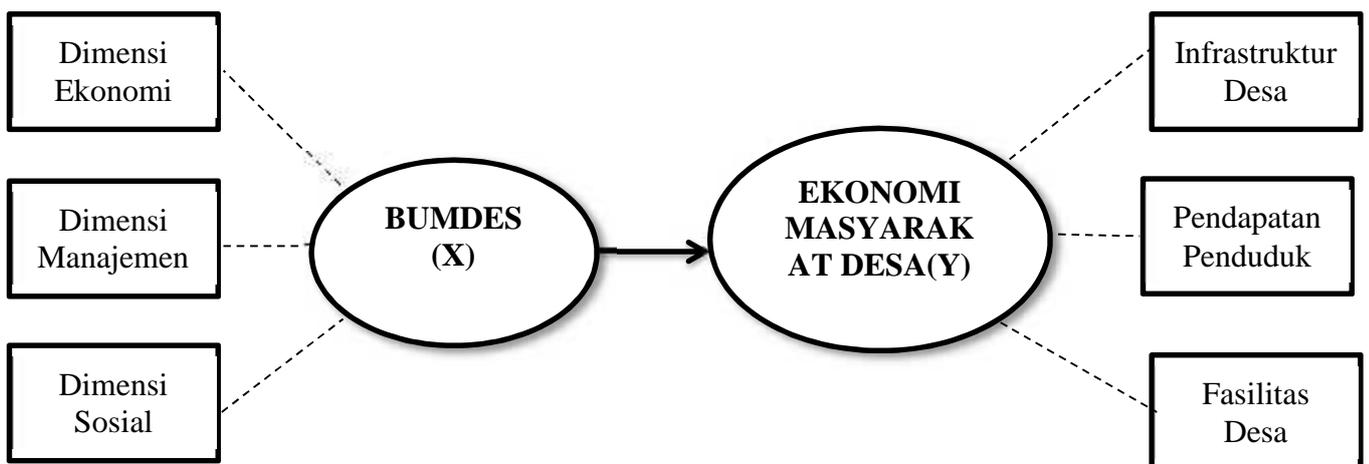
Sumber : Data diolah, 2022

2.4 Kerangka Konseptual

BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa dan merupakan tulang punggung perekonomian pedesaan sebagai lembaga sosial dan komersial yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan keuntungan baik itu untuk infrastruktur desa, pendapatan penduduk, maupun untuk fasilitas desa.

Sehingga yang menjadi kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis

Berdasarkan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual, disusun hipotesis sebagai berikut. Diduga bahwa Bumdes berpengaruh terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang rumusan masalah yang menanyakan hubungan dua variabel atau lebih. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik.

Desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif harus terstruktur, baku, formal dan dirancang sematang mungkin. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka jenis penelitian ini dikelompokkan pada penelitian kuantitatif.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Alasan peneliti memilih Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong tersebut sebagai tempat pelaksanaan penelitian disebabkan lokasi yang cukup mendukung untuk dilaksanakan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan juni sampai dengan bulan agustus 2022.

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah domain umum yang terdiri dari objek atau subjek yang menunjukkan sifat atau karakteristik tertentu bagi peneliti untuk diselidiki dan ditarik kesimpulannya. Seluruh masyarakat dengan BUMDes di Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong berpenduduk 150 orang.

2. Sampel

Sugiyono (2014:56) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik suatu populasi. Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan teknik tertentu sehingga mereka diharapkan dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan teknik random sampling atau lebih sering disebut dengan teknik simple random, sehingga dengan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel diperoleh:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel minimal

N = Populasi

e = *Error Margin* (Toleransi error 0,5%)

$$n = \frac{1}{1+1 (0,05)^2}$$

$$= \frac{1}{1,3}$$

$$= 110$$

Jumlah sampel yang akan diuji diperoleh dari rumus di atas. Dengan populasi 150 dan bilah kesalahan 0,05%, sampel yang disurvei adalah 110.090, yang dibulatkan ke 110 responden terdekat.

3.4. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data dalam bentuk faktual atau numerik, dan segala sesuatu yang dapat dihitung. Penelitian kuantitatif ini merupakan suatu metode pengujian suatu teori tertentu dengan menguji hubungan antar variabel. Studi ini juga dicakup oleh statistik deskriptif, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang dikumpulkan tentang informasi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat berdasarkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam peningkatan perekonomian Desa Rindingallo Kecamatan Rongkong.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, baik yang terdokumentasi maupun tidak, seperti yang dijelaskan pada

3.5. Tehnik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dengan menggunakan pertanyaan penelitian deskriptif dalam kuesioner yang diberikan langsung kepada responden oleh peneliti dan pengamatan langsung (observasi) terhadap subjek penelitian.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Atau, ini disebut metode peringkat total, menggunakan rentang peringkat 1 hingga 5 untuk tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. Saat mengisi kuesioner, responden diminta untuk menilai setiap pernyataan dengan memilih satu dari lima kemungkinan tanggapan dan memberi tanda centang ().

3.6. Instrumen Penelitian

alat penelitian Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kuantitatif dengan mengolah data atau memasukkan hasil komputasi variabel yang akan diuji dalam software SPSS.

1. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji valid tidaknya suatu survei. Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan apa yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2012).

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r yang dihitung dengan r -tabel dengan derajat kebebasan (df) = $n-2$. dimana n adalah jumlah sampel dan

$\alpha = 0,05$. Suatu item, pertanyaan, atau indikator dinyatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif (Ghozali, 2012).

2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau struktur. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau kredibel jika respon individu terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil (Ghozali (2012)). Keandalan diukur baik dengan mengukurnya sekali dan kemudian membandingkan hasilnya dengan pertanyaan lain atau dengan mengukur korelasi antara tanggapan terhadap suatu pertanyaan. SPSS memberikan pilihan untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji statistik Alpha Cronbach (). Suatu komponen atau variabel dianggap reliabel jika memberikan nilai Cronbach $\alpha > 0,6$ Ghozali (2012).

3. Skala Likert

No	Sikap Responden	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju	1
2.	Tidak Setuju	2
3.	Ragu-Ragu	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat Setuju	5

3.7. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Bumdes (X) dan variabel dependen yaitu perekonomian desa (Y). Adapun penjelasan operasionalnya yaitu :

1. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah Bumdes (X).

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dari penelitian ini adalah perekonomian desa (Y).

2. Definisi Operasional

- a. Bumdes adalah kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola secara sendiri oleh bumdes.
- b. perekonomian desa adalah merupakan suatu kegiatan masyaraakt dalam mengembangkan sistem perekonomian desa.

3.8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Menurut Arikunto (2013:3), dalam penelitian deskriptif hubungan antara dua variabel bersifat kausal atau fungsional.

Rumus umum untuk regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX + e$$

dimana:

Y = ekonomi desa Y

konstan ketika $a = x = 0$ (nilai konstan).

b = Koefisien regresi yang menunjukkan kenaikan atau penurunan variabel terikat. Jika b positif (+) = atas, jika b negatif (-) = bawah.

X = Bumdes

e=kesalahan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Rinding Allo

Sejak berdirinya Desa Rinding Allo ada 6 (enam) kepala Desa yang memimpin Desa, mulai dari nama pak bali gau salong, pak barandi dan sesuai regulasi terbaru di wilayah kabupaten Luwu Utara dengan sebutan kepala Desa.

Kondisi geografis Desa Rinding Allo terletak di wilayah pegunungan berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara yang aksesnya jauh dari perkotaan. Desa Rinding Allo secara administrasi terbagi menjadi 6 (enam) Dusun.

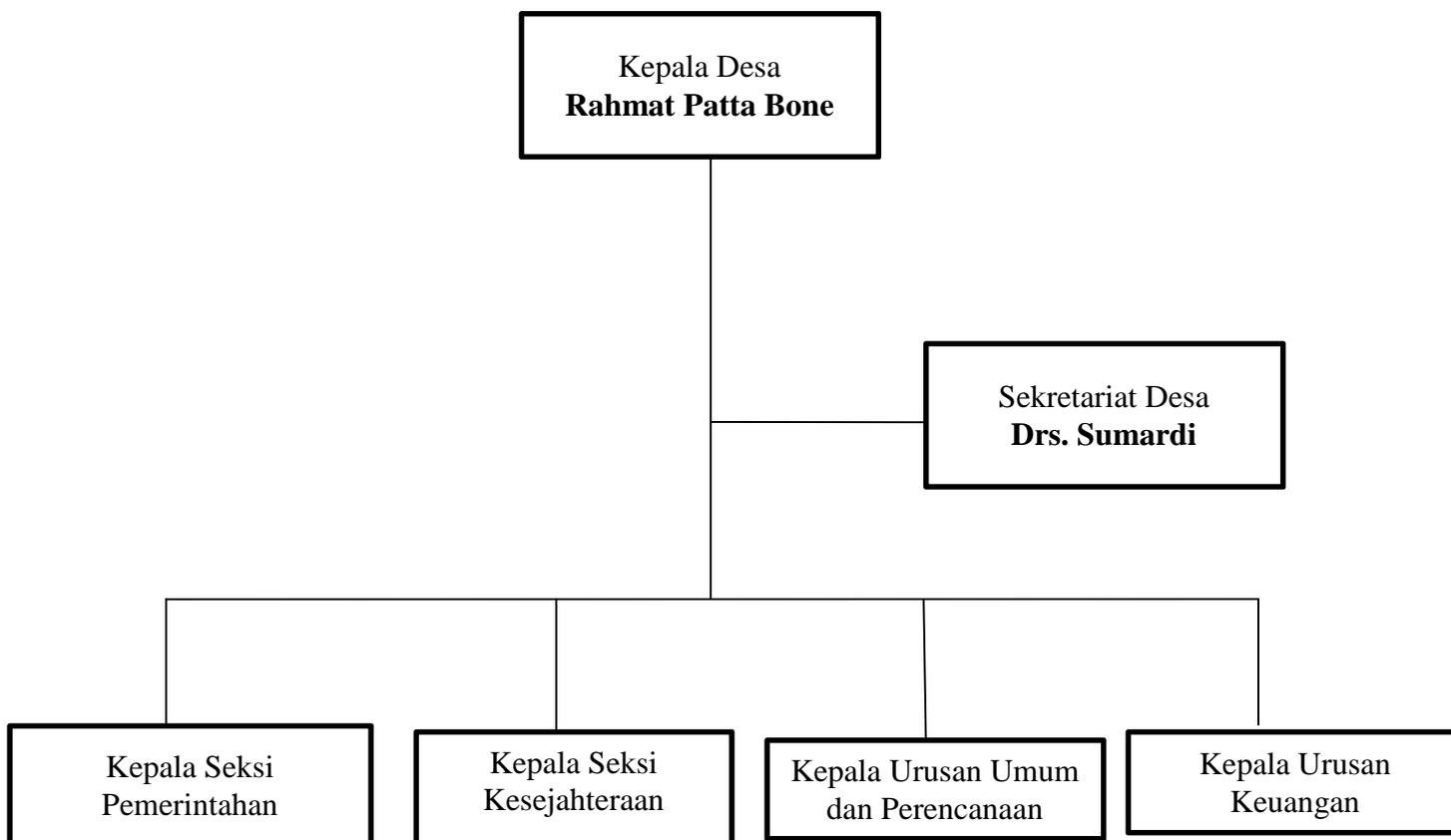
Kondisi perekonomian Desa Rinding Allo merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa selain mayoritas penduduk sebagai petani. Desa Rinding Allo tumbuh usaha warung-warung, toko, wisata, peternakan dan lain-lain.

Kemampuan keuangan Desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli Desa bantuan lain masih sangat kurang. Sarana prasarana Desa yang merupakan akses menuju pusat kota sebagian sudah di aspal dan keadannya kurang baik. Demikian pula dengan sarana irigasi yang ada di Desa Rinding Allo masih dalam system tradusional sehingga fungsinya belum maksimal dengan baik.

Berkembangnya jumlah penduduk di Desa Rinding Allo secara otomatis menuntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara

kesinambungan. Pada kondisi ekonomi yang sedang terjadi akibat pandem Covid-19, maka pemerintahan mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat sehingga dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

4.1.2 Struktur Organisasi



Gambar 4.1

4.2 Hasil Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memeriksa, meneliti, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas masalah yang

dirumuskan sebelumnya. Data dari penyebaran kuesioner dikuantifikasi sehingga dapat dievaluasi secara statistik sebagai berikut.

4.2.1 Analisis deskriptif Analisis

deskriptif adalah analisis berdasarkan hasil tanggapan yang diterima dari responden, yang memberikan pernyataan dan penilaian terhadap pernyataan yang disampaikan oleh penulis. Data yang diperoleh dari tanggapan responden terhadap pernyataan yang disiapkan dihitung sebagai persentase.

Tabel 4.1

Analisis Descriptive Statistic

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
jml.x	110	12	29	20.45	3.361
jml.y	110	12	29	21.20	3.558
Valid N (listwise)	110				

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel uji validitas Bumdes (X) dan ekonomi kerakyatan (Y), dapat disimpulkan di atas bahwa semua elemen proposisi dinyatakan valid untuk setiap variabel. Hal ini dapat dikonfirmasi dari hasil r-hitung. dimana suatu pernyataan dikatakan valid jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$.

4.3 Uji Validitas dan Realibilitas

4.3.1 Uji Validitas

Untuk menguji keefektifan alat, penulis menggunakan aplikasi SPSS Versi 21. Keefektifan dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel. Sistem penilaian menggunakan derajat kebebasan (df) = n-2. dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah komponen (variabel).

Dalam hal ini, besarnya $df = 110 - 2 = 108$ pada 0,05 pada r tabel adalah 0,1874.

Suatu elemen pertanyaan dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari r-tabel dan nilai r positif.

Tabel 4.2
Uji Validitas

No	Variabel Dan Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
	BUMDES (X)			
1	X.1	0.806	0.1874	Valid
2	X.2	0.395	0.1874	Valid
3	X.3	0.442	0.1874	Valid
4	X.4	0.749	0.1874	Valid
5	X.5	0.764	0.1874	Valid
No	Perekonomian Masyarakat (Y)	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	Y1	0.735	0.1874	Valid
2	Y2	0.489	0.1874	Valid
3	Y3	0.397	0.1874	Valid
4	Y4	0.750	0.1874	Valid
5	Y5	0.703	0.1874	Valid

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel uji validitas Bumdes (X) dan ekonomi kerakyatan (Y), dapat disimpulkan di atas bahwa semua elemen proposisi dinyatakan valid untuk setiap variabel. Hal ini dapat dikonfirmasi dari hasil r-hitungan, dimana suatu pernyataan dikatakan valid jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$.

4.3.2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas struktural dalam penelitian ini menggunakan alpha cronbach yang dihasilkan dari pengolahan data SPSS 21.

Nilai Cronbach alpha $> 0,60$ dianggap reliabel (Ghozali, 2012).

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas

Variabel penelitian	<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</i>	r standar	Keterangan
Bumdes	0,724	0.60	Relibel
Perekonomian Masyarakat	0,708	0.60	Relibel

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2022

Hasil uji reliabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini reliabel atau reliabel karena sangat reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien alpha diatas 0,60 dan dapat digunakan sebagai alat ukur yang handal atau reliabel. Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas.

4.4. Uji Hipotesis

4.2.2 Analisis Linear Sederhana

Uji regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dihitung dengan persamaan regresi sederhana.

Tabel 4.4
Hasil uji regresi linear Sederhana

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	19.503	2.104		9.270	.000
	jml.x1	.083	.102	.078	.817	.415

a. Dependent Variable: jml.x2

Hasil perhitungan koefisien regresi sederhana di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien konstanta adalah 19,503 dan koefisien variabel bebas (X) adalah 0,083. Ini memberikan persamaan regresi:

$$Y = 19,503 + 0,083X.$$

Berdasarkan rumus di atas, nilai tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

a = 19,503, artinya dari berstatus ekonomi 19,503 pada saat Bumdes bernilai 0 (nol).

b = 0,083 menunjukkan bahwa Bumdes berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Artinya, peningkatan 1 unit pada Bumdes (X) akan meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Y) sebesar 0,083.

4.2.3 Uji R²

Bertujuan untuk memperjelas apa kekuatan variabel independen, kami menggambarkan variabel dependen dilihat dari R-kuadrat.

Tabel 4.5
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19.503	2.104		9.270	.000
jml.x1	.083	.102	.078	.817	.415

a. Dependent Variable: jml.x2

Jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis diterima. Dari t-number hitung sebesar 9,270 dibandingkan dengan t-tabel (1,659 dengan nilai signifikansi 5%, t-number > t-tabel), dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki signifikansi Y. I can do it . Variabel mempengaruhi t tabel dengan menghasilkan

tingkat kecambah yang signifikan. 0,05. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa Bumdes berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu.

4.5. Pembahasan

Penelitian memperlihatkan bahwa BUMDES berpengaruh positif & signifikan terhadap perekonomian rakyat. Dalam Stewardship theory (Donadson & James, 1991) mendeskripsikan situasi dimana para manajemen organisasi tidaklah termotivasi sang tujuan-tujuan individu namun lebih ditunjukkan dalam target output primer mereka buat kepentingan organisasi.

Teori Stewardship, manajer atau pengelola BUMDES akan berperilaku sinkron kepentingan beserta (Raharjo, 2007). Ketika kepentingan steward & principals nir sama, maka steward akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, lantaran steward merasa kepentingan beserta & berperilaku sinkron menggunakan konduite principals adalah pertimbangan yg rasional lantaran steward akan melihat dalam bisnis pada mencapai tujuan organisasi

Implikasi teori Stewardship terhadap penelitian ini bisa mengungkapkan stawrd pada hal ini BUMDES menjadi suatu forum yg bonafide buat melakukan bisnis mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian principals yaitu rakyat & desa guna memperkuat perekonomian Desa dan menerima suatu output misalnya laba buat rakyat & Desa, menaruh pelayanan yg baik bagi masyarkat, membantu membuatkan potensi desa, supaya tercapainya maksud & tujuan pembentukan BUMDES secara maksimal.

Dengan melihat Kondisi BUMDES Desa Rinding Allo yang memiliki wisata kelas dunia yang dikenal dengan panorama yang begitu indah. Desa Rinding Allo memiliki beragam daya tarik wisata mulai wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan yang sangat berpotensi menjadi salah satu Desa Wisata kelas dunia.

Desa Rinding Allo adalah destinasi wisata yang paling komplit dengan panorama indah dan memesona dibalut dengan udara sejuk dan air terjun yang ekseotis. Atmosfir wisata Desa Rinding Allo akan menjadi cerita indah bagi pelancong dan pecinta *traveling*. Daya tarik Desa Rinding Allo adalah adanya wisata buatan yang menyajikan konten kreatif yang dipadukan dengan menawarkan atraksi bercocok tanam mulai cara tanam hingga panen.

Desa Rinding Allo yang merupakan Desa yang begitu banyak keindahannya membuat para pelancong tertarik untuk menikmati keindahannya sehingga para pelaku BUMDES dengan sendirinya akan meningkat seiring dengan respon baik dari wisatawan yang kemudian komoditas ekonomi masyarakat dapat meningkat dikarenakan adanya wisatawan yang berkunjung.

Segala macam usaha yang ada di Desa Rinding Allo memberikan dampak positif, baik dari segi pengembangan usaha maupun pemanfaatan sumber daya alam, yang dibuktikan dengan peningkatan angkatan kerja, pendapatan dan kegiatan ekonomi. Pendirian BUMDES. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Dimaz Rizki Ramanda (2017) yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDES yang dapat meningkatkan perekonomian kota melalui pengembangan badan usaha milik BUMDES telah membuka peluang bagi beberapa unit usaha yang didirikan oleh BUMDES. di komunitas. menawarkan. Untuk mendapatkan pekerjaan baru dan membantu masyarakat memobilisasi potensinya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis diatas tentang pengaruh BUMDES terhadap perekonomian masyarakat, Maka penulis menyimpulkan bahwa hasil penelitian BUMDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian masyarakat Desa Rinding Allo kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

5.2 Saran

1. Bagi pengelola BUMDES disarankan untuk terus mengevaluasi unit-unit usahanya agar BUMDES terus melakukan inovasi produk dan pengembangan jenis usaha yang bersifat berkelanjutan
2. Bagi pemerintah Desa disarankan untuk memfasilitasi para pengelola BUMDES dalam mengembangkan unit usaha BUMDES, dan untuk desa-desa yang BUMDES nya sudah tidak aktif agar di aktifkan kembali agar terwujudnya perekonomian masyarakat dengan baik di desa-desa yang ada di Kecamatan Rongkong.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. BPFE . Yogyakarta.
- Amri. 2020. Dampak Covid 19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*. 2 (1): 123-130.
- Ayu. 2015. Pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan pelaku UMKM pada sektor pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. *skripsi*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kediri.
- Agil. 2020. Dampak Covid 19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 12 (6): 19-24.
- Chaerani. 2020. Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi covid 19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*. 9 (4): 275-282.
- Gustika. 2016. Pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman (Studi Kasus Masyarakat Pemilik UKM). *Jurnal Ekonomi*. 4 (2): 107-115
- Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*.
- Intan. 2020. Dampak Covid 19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. *Jurnal Ners*. 4 (2): 31-39.
- Mankiw. 2007. *Makro Ekonomi*. Jakarta Erlangga.
- Mankiw. 2006. *Teori Makroekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Nur. 2020. Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Bening Prodi Manajemen*. 7 (2): 12-20.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Raja. 2010. *Kiat sukses mendirikan dan mengelola UMKM*. Elpress.
- Rahmi. 2020. Pengaruh Covid 19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*. 9 (2): 109-120.
- Sugiri. 2020. Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid 19. *Jurnal Bisnis*. 19 (1): 76-86

- Soemarjono. 2000. *Bertanam Padi Sawah*. Penerbit Swadaya. Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno. 2002. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. FEUI. Jakarta.
- Tika. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan Cetakan Pertama*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Thaha. 2020. Dampak Covid 19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*. 2 (1): 147-153.
- Tambunan. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-isu Penting*. LPJES. Jakarta.